

**TIM PENYUSUN BUKU
ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK
TAHUN 2009**

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	H. Syahrudin Haruna	Kepala Bappeda	Bappeda
2	Ir.H. Salewang Sabrang	Kepala BPS	BPS
3	Hikmah, ST,M.Si	Kabid Sosial Budaya	Bappeda
4	A.Mahadiana, SIP, M.Si Hj. Mudrah	Kabid	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Dra. Jumrah Husain	Kabid	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Hj. Agusnia Hasan Sultur	Kabid Catatan Sipil	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
7	J. Piterson	Kasi Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, & Olahraga
8	Yusran, S.Pd. M.Si		Dinas Pendidikan, Pemuda, & Olahraga
9	Hj. Mudrah	Koordinator Gizi	Dinas Kesehatan
10	Arsyad	Staf Dinkes	Dinas Kesehatan
11	Dra. Marjani		Bag. Kesra Setda
12	Erna		Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
13	Sumaryati		BPS
14	Nusrat		BPS
15	Hj. A.Sukmawaty Hatta,SS	Kasubid. Kesejahteraan Sosial	Bappeda
16	A. Syamsiah, SE	Staf Bappeda	Bappeda
17	Suherman, SE	Staf Bappeda	Bappeda
18	Hernawati	Staf Bappeda	Bappeda
19	Beatrix	Staf Bappeda	Bappeda
20	M. Itfan, SE	Staf Bappeda	Bappeda

**TIM KONTRIBUTOR
ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK
TAHUN 2009**

No	Nama	Utusan
1	Basnang Said	Universitas Asyariah Mandar
2	Aco Musaddad	LSM – Mandar Institute
3	Surgawan Askary	LSM – LK2BS
4	Rosniaty	LSM – Yasmib
5	Masyita	LSM – Yasmib
6	Rusman Tony	Radio Suara Tupalayo

**TIM EDITOR
ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK
TAHUN 2009**

NO	Nama	Instansi
1	Nirwan	Bappeda
2	Herman	Bappeda
3	Muhammad Ridha	Bappeda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Analisa Situasi Ibu dan Anak dengan Pendekatan Berbasis Hak Azasi Manusia (ASIA – HAM) Kabupaten Polewali Mandar. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang sistem Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan pendekatan Berbasis Hak Azasi Manusia di Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millennium, kegiatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan UNICEF periode 2006-2010 yang bertujuan meningkatkan pelayanan sosial bagi ibu dan anak.

ASIA - HAM merupakan kajian yang sangat diperlukan untuk menghasilkan dokumen dasar yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan terutama dalam pelayanan publik yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan. Sebagai dokumen, ASIA setiap tahun harus dilakukan pemutakhiran data dan informasi tentang situasi ibu dan anak untuk digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semua Tim Penyusun Laporan ASIA Kabupaten Polewali Mandar, seluruh partisipan yang terlibat aktif dalam proses analisis, kepada pihak UNICEF Makassar, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan bekerja keras demi tersusunnya laporan ini.

Demikianlah Penyusunan Laporan Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan Pendekatan Berbasis Hak Azasi manusia Kabupaten Polewali Mandar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala usaha yang kita lakukan dalam penyusunan laporan ini

Polewali, 30 Oktober 2009
Bupati Polewali Mandar

ALI BAAL

HALAMAN RINGKASAN (*EXECUTIVE SUMMARY*) RINGKASAN (SUMMARY)

Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan pendekatan berbasis hak Azasi Manusia (ASIA-HAM), adalah kajian situasi dan kondisi ibu dan anak di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan perspektif keterpenuhan anak dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasarnya.

Metode yang digunakan dalam Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan pendekatan berbasis Hak Azasi Manusia (ASIA-HAM) ini terdiri dari 3 kategori yang bisa disebut Tiga T yaitu Tinjauan atau Penilaian Situasi (merumuskan permasalahan, menggambarkan besarnya permasalahan dan memilih indikator), Telaahan atau Analisis (analisis kausalitas, analisis pola peran, analisis kesenjangan kapasitas) dan terakhir Tindakan atau Aksi (memilih aksi kunci, pengembangan kemitraan, dan rancangan program).

Dari hasil analisis situasi ibu dan anak diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu

Presentase penyebab kematian terbesar adalah pendarahan baik sebelum melahirkan (7 bln - partus = 5 ibu) maupun setelah melahirkan (0 -7 hari = 7 ibu) yaitu sebesar 64%. Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2007 tertinggi terjadi di Kec. Allu, sedangkan pada tahun 2008 tertinggi terjadi di Kec. Tapango, Matakali, Polewali dan Kec. Anreapi.

b. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi tertinggi pada tahun 2008 adalah BBLR sebesar 53,2 %, Asfiksia sebesar 19,1%, dan penyakit bayi berbasis lingkungan (misalnya diare, ISPA yaitu sebesar 27,7 %). Penyebab Kematian bayi tertinggi karena tidak terpenuhinya Hak akan kesehatan dan kesejahteraan, Hak untuk perlindungan anak, serta Hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga pengasuhan alternatif.

c. Presentase BBLR

Penduduk yang terkena Gizi buruk dan kekurangan Gizi dialami sebagian besar masyarakat miskin yang luasnya mencapai 17.74% dengan kelompok sasarannya adalah balita. Ini terjadi disebabkan belum terpenuhinya hak, yakni; Hak kesejahteraan dan kesehatan, Hak untuk mendapatkan perlindungan anak, Hak mendapatkan pendidikan, rekreasi dan budaya seni. Demikian pula masih tingginya angka kekurangan gizi pada ibu dan balita. Terbukti tingkat BBLR: 8,94% Gizi Buruk, BBLR: 2,21% (2008), Jumlah anak yang terkena gizi buruk tertinggi pada tahun 2007 ini terjadi di Kec. Binuang, sedangkan pada tahun 2008 tertinggi di Kec. Tubbi Taramanu dan Kec. Wonomulyo.

2. Bidang Pendidikan

- Anak Putus Sekolah dan Cakupan PAUD masih rendah
Anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar mencapai 3,17%, sedangkan tingkat SMP sebesar 5,79%. Pada tahun 2007 Anak putus sekolah banyak terjadi di Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar. Sedangkan cakupan PAUD dengan kelompok sasaran 0-6 tahun terdapat 77,65% tak terlayani PAUD, sedangkan Jumlah partisipasi PAUD terendah pada tahun 2007 terjadi di Kec. Wonomulyo dan 2008 di Kec. Tinambung. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya hak atas pendidikan dan kesehatan rekreasi.

3. Bidang Perlindungan Anak

- Presentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 - 18 tahun
Di Kabupaten Polewali Mandar, hampir terjadi diseluruh kecamatan jumlah anak belum memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2007 jumlah tertinggi terjadi di Kec. Luyo sedangkan pada tahun 2008 terdapat di Kec. Campalagian dan Bulo. Persentase kepemilikan akte kelahiran mencapai 53,97% anak tidak mempunyai akte kelahiran. Hal ini ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak sipil dan legalitas diri sehingga akan berdampak pada sektor pendidikan, peluang kerja, warisan, kesehatan, dan status sosial.

4. Bidang Keluarga Berencana (KB)

- Penggunaan alat kontrasepsi pada PUS
Tingginya angka penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki terdapat pada kelompok sasaran pasangan usia subur 25-49 tahun. Adapaun besarnya masalah mencapai 33.090 orang atau 97,73% akseptor KB perempuan dengan Jumlah pengguna KB perempuan pada tahun 2007-2008 tertinggi terjadi di Kec. Matakali. Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap masalah ini adalah menimbulkan ketimpangan gender dalam ber-KB disebabkan tidak adanya keadilan gender antara perempuan dan laki-laki, serta tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan kesetaraan gender.

5. Bidang Sosial

- Anak Terlantar Usia 0 – 18 Tahun
Hasil data tahun 2008 jumlah anak terlantar di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 1247 jiwa dengan kategori umur 0-18 tahun. Tingginya jumlah anak terlantar ini disebabkan karena belum terpenuhinya hak untuk pendidikan, hak untuk rekreasi, hak untuk sejahtera, hak asuh, dan hak tumbuh kembang anak. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan masalah/dampak pada anak pada bidang pendidikan, kesehatan, status sosial, kesejahteraan, bahkan masa depan anak.

Berdasarkan rumusan masalah dan prosesd analisis lebih lanjut dari data tersebut di atas, maka rekomendasi adalah:

1. Bidang Kesehatan

- Mengurangi jumlah kematian ibu dan bayi/balita melalui peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan beberapa kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dalam bentuk; amanah persalinan, pelacakan kasus kematian ibu/bayi, serta AMP non klinik.
- Mengurangi gizi buruk dan kurang (kekurangan gizi) bagi ibu dan balita melalui program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan; penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi; Pemberian tambahan makanan dan vitamin; penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, GAKY, kurang Vit. A & kekurangan zat gizi mikro lain yang terdiri dari kegiatan penanggulangan GAKY dan anemia gizi serta penanggulangan kekurangan vitamin A; Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi yang mencakup pada pelatihan kader posyandu baru.

2. Bidang Pendidikan

- Untuk menurunkan angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar melalui:
 - Sosialisai wajib belajar kepada orang tua dan masyarakat
 - Penyediaan pendidikan Alternatif yakni Paket A dan B
 - Sosialisasi tentang pendidikan gratis
 - Pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
- Untuk meningkatkan partisipasi anak mengikuti PAUD melalui:
 - Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya PAUD
 - Melakukan pendataan bagi anak usia dini
 - Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan orang tua untuk berperan serta dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3. Bidang Perlindungan Anak

- Untuk meningkatkan presentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun melalui pemenuhan hak dasar penduduk dalam penataan administrasi kependudukan dengan sub kegiatan peningkatan pelayanan dibidang pencatatan sipil dengan capaian terpenuhinya pencatatan sipil masyarakat (akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan akta pengakuan anak).

4. Bidang Keluarga Berencana (KB)

- Meningkatkan partisipasi PUS untuk mengikuti program KB melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan mengacu pada kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi pria.

5. Bidang Sosial

- Untuk menurunkan persentase anak terlantar usia 0-18 tahun melalui program pembinaan panti asuhan dengan adanya penyediaan biaya operasional panti asuhan.

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APS	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
AP ₅	:	Angka Putus Sekolah
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKABA	:	Angka Kematian Balita
AMH	:	Angka Melek Huruf
AKI	:	Angka Kematian Ibu
ANC	:	Antenatal Care
AIDS	:	Acquired Immunodeficiency Syndrome
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BA	:	Bustanul Athfal
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BBLR	:	Berat Badan Bayi Lahir Rendah
BCG	:	Basil Calmette Guerin
BTA	:	Basil Tahan Asam
BPN	:	Badan Pertahanan Nasional
BALITA	:	Bawah Umur Lima Tahun
DPT	:	Difteria Pertusis Tetanus
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
DHF	:	Dengue Hemorrhagic Fever
DI/II/III/IV	:	Diploma
GPK	:	Gerakan Pembaharuan Kakao
HKI	:	Hellen Keller International
HIV	:	Human Immunodeficiency Virus
IDU	:	Injection Drugs User
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernafasan Akut
KTT	:	Konfrensi Tingkat Tinggi
KB	:	Keluarga Berencana
KHPPIA	:	Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak
K4	:	Kunjungan Keempat
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KEK	:	Kekurangan Energi Kronis
KESPRO	:	Kesehatan Reproduksi
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LILA	:	Lingkar Lengan Atas
MDGs	:	Millenium Development Goals
MOP	:	Metode Operasi Pria
MOW	:	Metode Operasi Wanita

MPS	:	Making Pregnancy Safer
PUK	:	Penduduk Usia Kerja
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PUS	:	Pasangan Usia Subur
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PT	:	Perguruan Tinggi
PKK	:	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
POSYANDU	:	Pos Pelayanan Terpadu
RA	:	Raudatul Athfal
RT	:	Rumah Tangga
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SUKMA	:	Surat Keterangan Melek Aksara
SD	:	Sekolah Dasar
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TK	:	Taman Kanak-Kanak
TT	:	Tetanus Toxoid
TBC	:	Tuberculosis
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPS	:	Tempat Pembuangan Sementara
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
WUS	:	Wanita Usia Subur

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Tim Kontributor dan Tim Editor	ii
Kata Pengantar	iii
Halaman Ringkasan (<i>Executive summary</i>)	iv
Daftar Singkatan	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xv
Daftar Matriks	xviii
Daftar Grafik	xxi
Daftar Gambar	xxii
Lembar Penegasan	xxiv
Gambar Peta Daerah	xxv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	8
1.3 Proses Penyusunan ASIA	9
1.4 Manfaat	11
BAB II Gambaran Umum Daerah	12
2.1 Wilayah	12
2.2 Penduduk	13
2.3 Ketenagakerjaan	15
2.3.1 Angkatan Kerja	16
2.4 Sumberdaya Daerah	17
2.4.1 Pendidikan	17
2.4.2 Kesehatan	18
2.4.3 Perlindungan Anak	18
2.4.4 Keluarga Berencana	19
2.5 Anggaran	19
2.5.1 Program/kegiatan yang bersumber dari APBD	19
2.5.2 Program dan kegiatan yang bersumber dari Non APBD	20
2.6 Kebijakan atau Peraturan	21

2.7	Profil Ibu dan Anak	22
2.7.1	Pendidikan	22
2.7.2	Kesehatan	27
2.7.2.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	27
2.7.2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	28
2.7.2.3	Angka Kematian Balita	29
2.7.2.4	Balita dengan Bawah Garis Merah (BGM)	30
2.7.2.5	Anak di Imunisasi Campak sebelum Usia 1 tahun	30
2.7.2.6	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	32
2.7.2.7	Balita yang Naik Berat Badannya Sesuai Garis Pertumbuhan	33
2.7.2.8	Cakupan Kunjungan Bayi	34
2.7.2.9	Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita	35
2.7.2.10	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif	36
2.7.2.11	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	37
2.7.2.12	Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	38
2.7.2.13	Kunjungan K4	39
2.7.2.14	Pelayanan Nifas	40
2.7.2.15	Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	41
2.7.2.16	Prevalensi Malaria	42
2.7.2.17	Penderita Malaria yang Mendapat Pengobatan Efektif	43
2.7.2.18	Prevalensi TB	44
2.7.2.19	Angka Kematian TB	45
2.7.2.20	Angka Penemuan Pasien TB-BTA+	46
2.7.2.21	Angka Kesembuhan Pasien Baru Tuberkolosis (AKP-TB)	47
2.7.2.22	Angka Kesakitan Penyakit Kusta	48
2.7.2.23	Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah (DBD)	49
2.7.2.24	Case Fatality Rate pada Saat KLB	50
2.7.3	Kependudukan Catatan Sipil	51
2.7.4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55
2.7.4.1	Pemberdayaan Perempuan	55

2.7.4.2	Perlindungan Anak	61
2.7.5	Keluarga Berencana (KB)	63
2.7.5.1	Persentase Peserta KB Perempuan dan Laki-laki ..	63
2.7.5.2	Angka Pemakaian Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS)	66
2.7.5.3	Angka Penggunaan Kondom	67
2.7.6	Sosial	68
2.7.6.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	68
BAB III Metodologi Penyusunan ASIA		70
3.1	Tinjauan atau Penilaian Situasi	70
3.2	Telaan atau Analisis	71
3.2.1	Analisis Kausalitas	71
3.2.2	Analisis Pola Peran	72
3.2.3	Analisis Kesenjangan Kapasitas	72
3.3	Tindakan atau Aksi Kunci	72
BAB IV Hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak		74
4.1	Bidang Kesehatan	74
4.1.A	Penilaian Situasi	74
4.1.A.1	Perumusan masalah pada bidang kesehatan	74
4.1.A.2	Penggambaran Besarnya Permasalahan	75
4.1.A.3	Pemilihan Indikator	76
4.1.B	Telaahan atau Analisis	79
4.1.B.1	Analisis Kausalitas (sebab-akibat)	79
4.1.B.2	Analisis Pola peran	87
4.1.B.3	Analisis Kesenjangan Kapasitas	89
4.1.C	Tindakan atau Aksi Kunci	96
4.1.C.1	Identifikasi Aksi-Aksi Utama	96
4.1.C.2	Identifikasi dan Analisis Potensi kemitraan	100
4.1.C.3	Strategi Pengembangan Kemitraan	101
4.1.C.4	Rancangan Program (Pohon Tujuan)	104
4.1.C.5	Matrix Logframe	107
4.2	Bidang Pendidikan	108
4.2.A	Penilaian Situasi	108

4.2.A.1	Perumusan masalah pada bidang Pendidikan	108
4.2.A.2	Penggambaran Besarnya Permasalahan	108
4.2.A.3	Pemilihan Indikator	108
4.2.B	Telaahan atau Analisis	110
4.2.B.1	Analisis Kausalitas (sebab-akibat)	110
4.2.B.2	Analisis Pola peran	113
4.2.B.3	Analisis Kesenjangan Kapasitas	116
4.2.C	Tindakan atau Aksi Kunci	118
4.2.C.1	Identifikasi Aksi-Aksi Utama	118
4.2.C.2	Identifikasi dan Analisis Potensi kemitraan	122
4.2.C.3	Strategi Pengembangan Kemitraan	123
4.2.C.4	Rancangan Program (Pohon Tujuan)	125
4.2.C.5	Matrix Logframe	127
4.3	Bidang Perlindungan Anak	129
4.3.A	Penilaian Situasi	129
4.3.A.1	Perumusan masalah pada bidang Perlindungan Anak.....	129
4.3.A.2	Penggambaran Besarnya Permasalahan	129
4.3.A.3	Pemilihan Indikator	130
4.3.B	Telaahan atau Analisis	131
4.3.B.1	Analisis Kausalitas (sebab-akibat)	131
4.3.B.2	Analisis Pola peran	133
4.3.B.3	Analisis Kesenjangan Kapasitas	134
4.3.C	Tindakan atau Aksi Kunci	141
4.3.C.1	Identifikasi Aksi-Aksi Utama	141
4.3.C.2	Identifikasi dan Analisis Potensi kemitraan	145
4.3.C.3	Strategi Pengembangan Kemitraan	145
4.3.C.4	Rancangan Program (Pohon Tujuan)	146
4.3.C.5	Matrix Logframe	147
4.4	Bidang Perlindungan Anak	148
4.4.A	Penilaian Situasi	148
4.4.A.1	Perumusan masalah pada bidang Perlindungan Anak.....	148
4.4.A.2	Penggambaran Besarnya Permasalahan	148
4.4.A.3	Pemilihan Indikator	149

4.4.B	Telaahan atau Analisis	150
4.4.B.1	Analisis Kausalitas (sebab-akibat)	150
4.4.B.2	Analisis Pola peran	152
4.4.B.3	Analisis Kesenjangan Kapasitas	153
4.4.C	Tindakan atau Aksi Kunci	155
4.4.C.1	Identifikasi Aksi-Aksi Utama	155
4.4.C.2	Identifikasi dan Analisis Potensi kemitraan	156
4.4.C.3	Strategi Pengembangan Kemitraan	156
4.4.C.4	Rancangan Program (Pohon Tujuan)	157
4.4.C.5	Matrix Logframe	158
4.4	Bidang Sosial	159
4.4.A	Penilaian Situasi	159
4.4.A.1	Perumusan masalah pada bidang Sosial	159
4.4.A.2	Penggambaran Besarnya Permasalahan	159
4.4.A.3	Pemilihan Indikator	160
4.4.B	Telaahan atau Analisis	161
4.4.B.1	Analisis Kausalitas (sebab-akibat)	161
4.4.B.2	Analisis Pola peran	163
4.4.B.3	Analisis Kesenjangan Kapasitas	164
4.4.C	Tindakan atau Aksi Kunci	167
4.4.C.1	Identifikasi Aksi-Aksi Utama	167
4.4.C.2	Identifikasi dan Analisis Potensi kemitraan	168
4.4.C.3	Strategi Pengembangan Kemitraan	168
4.4.C.4	Rancangan Program (Pohon Tujuan)	169
4.4.C.5	Matrix Logframe	170
BAB V	Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	171
5.1	Program/Kegiatan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Terkait Situasi Ibu dan Anak Tahun 2010 Kab. Polewali Mandar	172
5.2	Program/Kegiatan Pendukung Terkait Situasi Ibu dan Anak Tahun 2010 Kabupaten Polewali Mandar	179
BAB VI	Penutup	187
6.1	Kesimpulan	187
6.1.1	Bidang Kesehatan.....	187

6.1.2	Bidang Pendidikan	188
6.1.3	Bidang Perlindungan Anak	188
6.1.4	Bidang Keluarga Berencana	189
6.1.5	Bidang Sosial	189
6.2	Rekomendasi	190
6.1.1	Bidang Kesehatan.....	190
6.1.2	Bidang Pendidikan	191
6.1.3	Bidang Perlindungan Anak	191
6.1.4	Bidang Keluarga Berencana	191
6.1.5	Bidang Sosial	191
Datar Pustaka	xxvi
Lampiran-lampiran		

DAFTAR TABEL

1.	Banyaknya Desa, Kelurahan, Dusun, Lingkungan, RK/RW dan RT dirinci Per-Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2008	13
2.	Karakteristik Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2008	14
3.	Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar dan Sulawesi Barat Tahun 2008	16
4.	APM Prasekolah 4 - 6 tahun (TK-RA/BA)	23
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP dirinci Per Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007	24
6.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun dirinci Per Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007	25
7.	Angka Putus Sekolah dirinci Per Kecamatan, Jenjang Pendidikan SD, SMP, dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007	26
8.	Angka Kematian Ibu (AKI) Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	27
9.	Angka Kematian Bayi (AKB) Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	28
10.	Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Dirinci Per Kecamatan	29
11.	Persentase Balita dengan Bawah Garis Merah (BMG) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	30
12.	Proporsi Anak di Imunisasi Campak Sebelum Usia 1 Tahun di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	31
13.	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Polewali Mandar	32
14.	Persentase Balita yang Naik Berat Badannya Sesuai Garis Pertumbuhan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	33
15.	Persentase Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	34
16.	Persentase Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	35
17.	Persentase Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	36
18.	Jumlah Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	37
19.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	38
20.	Cakupan Kunjungan K4 di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	39
21.	Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Polewali Mandar	

Tahun 2007 – 2008	40
22. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 – 2008	41
23. Prevalensi Malaria di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	42
24. Penderita Malaria yang Mendapat Pengobatan efektif di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2007-2008	43
25. Prevalensi TB di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	44
26. Angka Kematian TB di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2007-2008	45
27. Persentase Angka Penemuan Pasien TB-BTA+ di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	46
28. Angka Kesembuhan Pasien Baru Tuberkolosis (AKP-TB) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007	47
29. Angka Kesakitan Penyakit Kusta di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	48
30. Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah (DBD) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	49
31. Case Fatality Rate pada Saat KLB di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008	50
32. Jumlah Penduduk Yang memiliki dan tidak memiliki Akta Kelahiran Tahun 2009	51
33. Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Menurut Kecamatan dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007	52
34. Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	53
35. Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Kabupaten Polewali Mandar	54
36. Jumlah anggota Dewan Kabupaten Polewali Mandar Menurut Jenis kelamin Tahun 2008	55
37. Jumlah anggota Camat Kabupaten Polewali Mandar Menurut Jenis kelamin Tahun 2007- 2008	56
38. Persentase Lurah /desa di Kabupaten menurut kelamin Tahun 2007- 2008	57
39. Persentase Persentase Pejabat Sturuktural Dirinci menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2007- 2008	58
40. Tabel Persentase Pengurus Organisasi Politik Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008.	59
41. Persentase Perempuan sebagai Pengurus Organisasi Sosial di Kabupaten. Polewali Mandar Tahun 2007-2008	60
42. Persentase Perempuan sebagai Pengurus Organisasi Sosial di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007- 2008	61
43. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Tahun 2006	62
44. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Kekerasan	

Terhadap Anak (KTA)Tahun 2007	62
45. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Kekerasan T terhadap Anak (KTA) Tahun 2008	63
46. Persentase Peserta KB Perempuan dan Laki-laki di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	64
47. Angka Pemakaian Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Per-kecamatan di Kab. Polewali Mandar Tahun 2007-2008	66
48. Angka Penggunaan Kondom Dirinci Perkecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	67
49. Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009	69
50. Prioritas Masalah Situasi Ibu Dan Anak	75
51. Prioritas masalah situasi ibu dan anak (Putus Sekolah dan PAUD)	108
52. Prioritas Masalah Situasi Ibu dan Anak (Akte Kelahiran).....	129
53. Angka Penggunaan Alat Kontrasepsi Perempuan Dibandingkan dengan Laki-Laki	149
54. Prioritas Masalah Situasi Ibu Dan Anak (Anak Terlantar)	159
55. Program/Kegiatan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Terkait Situasi Ibu dan Anak Tahun 2010 Kabupaten Polewali Mandar	172
56. Program/Kegiatan Pendukung Terkait Situasi Ibu dan Anak Tahun 2010 Kabupaten Polewali Mandar	179

DAFTAR MATRIKS

1.	Penilaian Situasi Tingginya Angka Kematian Ibu	77
2.	Penilaian Situasi Tingginya Angka Kematian Bayi	77
3.	Penilaian masalah dan hak yang tidak terpenuhi akibat dari gizi buruk dan kekurangan gizi	78
4.	Telaah Pola Peran Antara Pengemban Tugas Terhadap Pemegang Klaim Untuk Masalah Belum Terpenuhinya Hak ibu dan Bayi Atas Kesehatan dan Kesejahteraan	87
5.	Telaah Pola Peran Antara Pengemban Tugas Terhadap Pemegang Klaim Untuk Masalah Belum Terpenuhinya Hak Anak Atas Perbaikan Gizi	88
6.	Kapasitas Keluarga dan Masyarakat	89
7.	Analisis kesenjangan kapasitas posyandu sebagai pemegang klaim terhadap pemegang tugas dalam masalah terpenuhinya hak Ibu dan Bayi atas Kesehatan dan kesejahteraan	90
8.	Analisis kesenjangan kapasitas Puskesmas sebagai pemegang klaim terhadap pemegang tugas dalam masalah terpenuhinya hak Ibu dan Bayi atas Kesehatan dan kesejahteraan	91
9.	Analisis kesenjangan kapasitas LSM/Stakeholders_sebagai pemegang tugas terhadap pemegang klaim dalam masalah terpenuhinya hak Ibu dan bayi atas Kesehatan dan Kesejahteraan	92
10.	Analisis Kesenjangan Kapasitas_Pemdes_Sebagai Pemegang Tugas Terhadap Pemegang Klaim Dalam Masalah Terpenuhinya Hak Ibu dan Bayi Atas Kesehatan dan kesejahteraan	93
11.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Balita Sebagai Pemegang Klaim Dalam Rangka Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Dengan Hak Anak Atas Perbaikan Gizi	94
12.	Analisis kesenjangan kapasitas posyandu sebagai pemegang klaim terhadap pemegang tugas dalam masalah terpenuhinya hak anak atas perbaikan gizi	95
13.	Analisis kesenjangan kapasitas LSM/Stakeholders_sebagai pemegang tugas terhadap pemegang klaim dalam masalah terpenuhinya hak anak atas perbaikan gizi	96
14.	Analisis Kesenjangan Kapasitas_Pemdes_Sebagai Pemegang Tugas Terhadap Pemegang Klaim Dalam Masalah Terpenuhinya Hak Anak Atas Perbaikan Gizi	96
15.	Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Dinas Kesehatan (pemegang hak) dalam menuntut hak Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan ibu dan Bayi	97
16.	Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Dinas Kesehatan (pemegang hak) dalam menuntut hak Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan ibu dan Bayi	98

17. Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Dinas Kesehatan (pemegang hak) dalam menuntut hak Hak Atas Perbaikan Gizi	99
18. Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemdes (pemegang hak) dalam Menuntut Hak Atas Perbaikan Gizi	100
19. Pemangku pemetaan kepentingan Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan (Ibu dan bayi)	100
20. Pemangku pemetaan kepentingan Hak Atas Perbaikan Gizi	101
21. Pengembangan Kemitraan Atas Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Ibu dan Bayi	102
22. Pengembangan Kemitraan Atas Hak Perbaikan Gizi	103
23. Logframe Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Ibu dan Bayi	107
24. Anak Putus Sekolah masih tinggi dan cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah	109
25. Matriks Telaah Pola Peran Pengemban Tugas Terhadap pemegang klaim untuk masalah belum terpenuhinya Hak Anak Atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	113
26. Pola Peran Antara Pengemban Tugas Terhadap Pemegang Klaim Untuk Masalah Belum Terpenuhinya Hak Anak atas Pendidikan Dasar	115
27. Analisis Kesenjangan Kapasitas anak Sebagai Pemegang Klaim Dalam Rangka Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Dengan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Untuk Semua	116
28. Analisis kesenjangan kapasitas Pemkab sebagai pengembang tugas terhadap pemegang klaim dalam masalah PAUD	117
29. Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten (Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga) dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan dasar	118
30. Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan Dasar	119
31. usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas Diknas (pemegang hak) dalam menuntut hak atas belum terpenuhinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	120
32. Matrix usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas kecamatan (pemegang hak) dalam menuntut hak atas belum terpenuhinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	121
33. Pemetaan Pemangku kepentingan Hak Pendidikan Dasar	122
34. Pemetaan Pemangku kepentingan Partisipasi PAUD	122
35. Pengembangan Kemitraan Hak Mendapatkan pendidikan Dasar	123
36. Pengembangan Kemitraan Partisipasi PAUD	124
37. Logframe Hak Atas Pendidikan Dasar Untuk Semua	127
38. Logframe Partisipasi PAUD	128
39. Penilaian Situasi Tidak Terpenuhinya Hak Anak Dalam Memiliki Akte Kelahiran	130

40.	Pola Peran Antara Pengemban Tugas Terhadap Pemegang Klaim belum Terpenuhinya Hak Anak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran	133
41.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemdes Sebagai Pengemban Tugas dalam kaitannya hak atas kepemilikan akte kelahiran	134
42.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Sebagai Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran	135
43.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Capil Sebagai Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran	136
44.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Kecamatan Sebagai Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran	137
45.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemdes Sebagai Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran	138
46.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Lingkungan / Dusun Sebagai Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Hak atas Kepemilikan akte Kelahiran	139
47.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Bidan / Dukun Sebagai Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Hak atas Kepemilikan akte Kelahiran	140
48.	Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten (Capil) dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran	141
49.	Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran	142
50.	Usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas Capil (pemegang hak) dalam menuntut hak atas Akte Kelahiran Anak	143
51.	Usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas kecamatan (pemegang hak) dalam menuntut hak atas akte kelahiran anak	144
52.	Pemetaan Pemangku Kepentingan Perlindungan Anak Pemangku pemetaan kepentingan Hak Atas Akte Kelahiran	145
53.	Pengembangan Kemitraan Hak Mendapatkan Akte Kelahiran	145
54.	Logframe Hak Atas Kepemilikan akte Kelahiran	147
55.	Penilaian Situasi Keluarga Berencana	149
56.	Telaah Pola Peran antara Pengemban Tugas Terhadap pemegang klaim untuk Masalah tingginya pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan	151
57.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemda sebagai pengemban Tugas terhadap Pemegang Klaim dalam Masalah tingginya pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan	153
58.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Orang Tua sebagai pengemban Tugas terhadap Pemegang Klaim dalam masalah tingginya pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan	154
59.	Usulan Aksi untuk mempersempit kesenjangan kapasitas Badan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan & KB Sebagai pengembang tugas dalam kaitannya dengan tingginya pemakaian alat kontrasepsi untuk perempuan	155

60.	Pemetaan Pemangku kepentingan	156
61.	Strategi Pengemban Kemitraan	156
62.	Logframe pemakaian alat kontrasepsi antara perempuan dan laki-laki	158
63.	Penilaian situasi Kesejahteraan Anak	160
64.	Matriks Telaah Pola Peran antara Pengemban Tugas Terhadap pemegang klaim untuk Masalah belum terpenuhinya Hak Anak Atas Anak Terlantar ...	163
65.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Orang Tua sebagai pengemban Tugas terhadap Pemegang Klaim Dalam masalah hak anak atas anak terlantar ...	164
66.	Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten sebagai pengembangan Tugas terhadap Pemegang Klaim masalah hak anak atas anak terlantar	165
67.	Analisis Kesenjangan Orang tua untuk menuntut Hak-hak kepada pengembangan Tugas dlm kaitannya dengan Hak Asuh anak memperoleh hak asuh	166
68.	Usulan Aksi untuk mempersempit kesenjangan kapasitas Dinas Sosial sebagai pengembang tugas Dalam kaitannya dengan Hak Anak terlantara memperoleh Hidup Layak	167
69.	Pemetaan Pemangku Kepentingan Sosial	168
70.	Strategi Pengemban Kemitraan	168
71.	Logframe berkurangnya anak terlantar	170

DAFTAR GRAFIK

1.	Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008	15
2.	Proporsi Anggota DPR Kabupaten Polewali Mandar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007 – 2008	56
3.	Persentase Camat Perempuan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 – 2008	56
4.	Persentase Kepala Desa/Lurah Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 – 2008.....	57
5.	Rasio Pejabat Perempuan Dirinci Menurut Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	57
6.	Persentase Perempuan Sebagai Pengurus Partai Politik di Kabupaten Polewali Mandar Agustus Tahun 2008-2009	59
7.	Persentase Pengurus Organisasi Sosial Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	60
8.	Peserta KB Perempuan dan Laki-laki di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2008	65

DAFTAR GAMBAR

1.	Analisis Kausalitas Kematian Ibu karena pendarahan	79
2.	Analisis Kausalitas Kematian Bayi	82
3.	Masalah kekurangan gizi balita	84
4.	Pohon Tujuan Masalah Kematian Ibu	104
5.	Pohon Tujuan Masalah Kematian Bayi	105
6.	Pohon Tujuan Masalah Kurang Gizi	106
7.	Analisis Kausalitas (sebab-akibat) Anak Putus Sekolah	110
8.	Analisis kausalitas PAUD masih rendah	111
9.	Pohon Tujuan mengurangi jumlah anak putus sekolah	125
10.	Tingginya Partisipasi PAUD	126
11.	Pohon Masalah Akte Kelahiran	131
12.	Pohon Tujuan Perlindungan Anak	146
13.	Pohon Masalah Tingginya pemakaian Alat Kontrasepsi pada perempuan	150
14.	Pohon tujuan Kesetaraan pemakaian alat kontrasepsi antara perempuan dan laki-laki	157
15.	Pohon Masalah Anak Terlantar	161
16.	Pohon Tujuan Berkurangnya Jumlah Anak Terlantar	169

LEMBAR PENEGASAN

Selain sebagai referensi pengetahuan bagi penulis dan penerbitan; proses studi, temuan, inter pretasi, konklusi, dan rekomendasi yang terdapat dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami konteks situasi masa lalu dan saat ini, identifikasi peluang, kelemahan, kapasitas, sumberdaya, dan keputusan kelayakan, serta latar-belakang prioritas; sebagai bagian integral yang dibutuhkan bagi Pembelajaran Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, dalam rangka melengkapi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah guna keperluan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategi SKPD selanjutnya setiap tahun dilakukan pemukthiran data dan informasi tentang sistuasi ibu dan anak untuk keperluan penyusunan RKPD dan Renja SKPD .

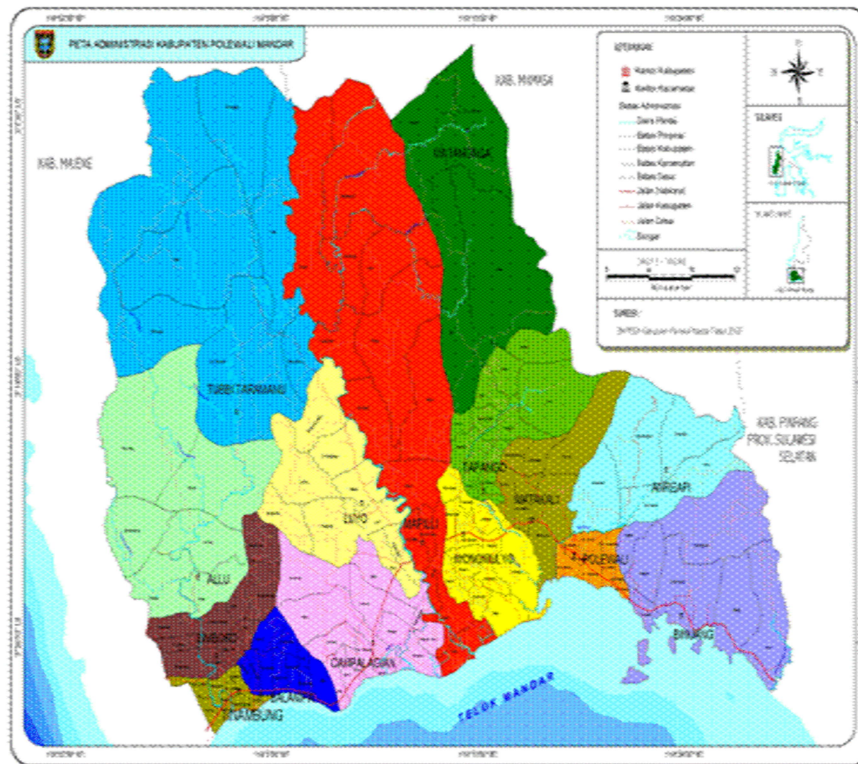


Data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui proses Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan Pendekatan Berbasis Hak-Azasi ini adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar atau pihak yang mewakili sebagaimana dijelaskan di dalam dokumen ini. Oleh karena itu, siapa pun yang menggunakan data atau informasi dalam dokumen ini wajib sepengetahuan dan/atau mencantumkan sumber atau pemilik.

(Pemerintah-Kabupaten Polewali Mandar)

***Alamat Kontak:* Sekretariat KHPPA, Bappeda Kabupaten Polman
Jl. Manunggal No. 11 Telp./Fax 0428 21120/0428 22422
Kabupaten Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat**

GAMBAR PETA DAERAH



DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda, ***Buku Analisis Hasil Survey MDGs Kecamatan 2007, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007.*** Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2009.
- _____, ***Buku Analisis Hasil Data Sektor MDGs 2007.*** Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, Tahun 2009.
- _____, ***Polewali Mandar Dalam Angka 2009.*** Kerjasama BPS dengan Bappeda Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, Tahun 2009.
- _____, ***Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014,*** Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, Tahun 2009.
- Bappenas, ***Buku Petunjuk Teknis Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di Daerah.*** Jakarta, Tahun 2009